




RENCANA KERJA


Balai KSDA Sumatera Barat


Tahun 2021



 **BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT**

 Jalan Khatib Sulaiman No. 46 Padang

 (0751) 7054136

 (0751) 7053343



BALAI KSDA SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA

BALAI KSDAE

TAHUN 2021

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**P A D A N G
OKTOBER, 2020**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT
Nomor: SK. 134/K. 9/TU/REN/10/2020

TENTANG
RENCANA KERJA BALAI KSDA SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat tentang Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;

25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA BALAI KSDA SUMATERA BARAT TAHUN 2021.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatifserta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dankehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Balai KSDA Sumatera Barat ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2021 di seluruh unit kerja lingkup Balai KSDA Sumatera Barat.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 8 Oktober 2020



Dr. Ir. Erly Sukrismanto, M.Sc
NIP. 19621110 199003 1 003

**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT**

SK.134/K.9/TU/REN/10/2020

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI KSDA SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 disusun sebagai upaya dalam meningkatkan performa dan akuntabilitas penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan bidang Konservasi.

Sebagai penjabaran dari tahun kedua rencana strategis (Renstra) Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2020--2024, diharapkan Renja Tahun 2021 mampu berperan sebagai instrumen dalam pencapaian sasaran pembangunan dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Renja Tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib pelaporan Balai KSDA Sumatera Barat.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada seluruh pimpinan dan jajaran pelaksana dalam melaksanakan Pembangunan Kehutanan bidang KSDAE.

Padang, 8 Oktober 2020

Kepala Balai



Dr. Ir. Ely Sukrismanto, M.Sc
NIP. 19621110 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	
Ringkasan Eksekutif.....	iv
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	6
BAB. II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020.....	9
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020.....	9
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020.....	12
BAB. III RENCANA KERJA TAHUN 2021.....	16
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional.....	16
B. Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	17
BAB. IV PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Capaian Indikator Kinerja Program Balai KSDA Sumatera Barat KSDAE Tahun 2019.....	11
Tabel 2	: Capaian Indikator Kinerja Program Balai KSDA Sumatera Barat KSDAE Tahun 2020 (s.d. September 2020).....	12
Tabel 3	: Penyerapan Anggaran DIPA Balai KSDA Sumatera Barat TA 2019	15
Tabel 4	: Realisasi Anggaran BKSDA Sumatera Barat Per Tanggal 30 September 2020.....	16
Tabel 5	: Rincian Pagu Anggaran Balai KSDA Sumatera Barat TA 2020	21
Tabel 6.	: Pagu Indikatif Tahun 2020BKSDA Sumbar per Jenis Belanja & Sumber Dana	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	i
Gambar 2	ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menuju kondisi birokratis yang lebih baik, maka pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Nasional.

Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional Ditjen KSDAE memberikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas yang diemban Balai KSDA Sumatera Barat. Dalam penyusunan RKA-KL dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut.

Balai KSDA Sumatera Barat selaku instansi vertikal dibawah Ditjen KSDAE dibebankan 2 prioritas nasional dari 7 prioritas nasional yang telah dicanangkan untuk tahun 2020-2024, sesuai dengan eselon I di atasnya, dan kedua prioritas nasional itu adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 - Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

2. Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim
 - Mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon

Renja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 disusun sebagaibagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitaspenyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumenperencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam danEkosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkansecara berjenjang.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat pada tahun 2021sebagaimana pagu anggarannya,direncanakan sebesar Rp 24.477.201.000,- (dua puluh empatmilyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus saturibu rupiah).

Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja

program yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial; serta (6) Kegiatan Dukungan Manajemen Satker.

Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran dalam rangka pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan.

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat dan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2020-2024. Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Provinsi Sumatera Barat menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini dijalankan oleh Balai KSDA Sumatera Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Balai KSDA Sumatera Barat antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2020 bagi Balai KSDA Sumatera Barat. Oleh karena itu disusunlah Rencana Kerja (Renja) Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 sebagai pedoman dan acuan dimaksud. Renja Balai KSDA Sumatera Barat disusun sebagai amanat dari Renstra Balai KSDA Sumatera Barat dan Renstra Ditjen KSDAE. Renja ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Empat pilar itu adalah : kelembagaan politik dan hukum yang mantap,

kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Sementara 7 agenda pembangunan tahun 2020-2024 yaitu : memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; membangun kebudayaan dan karakter bangsa; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) prioritas nasional yang dicanangkan didalam RPJMN tahun 2020-2024, Kementerian LHK mendapatkan mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan 4 Prioritas Nasional (PN), namun Balai KSDA Sumatera Barat selaku instansi vertikal dibawah Ditjen KSDAE dibebankan 2 prioritas nasional dari 7 prioritas nasional yang telah dicanangkan untuk tahun 2020-2024, sesuai dengan eselon I diatasnya, dan kedua prioritas nasional itu adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 - Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
2. Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim
- Mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Kedudukan

Balai KSDA Sumatera Barat adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal KSDAE. Balai KSDA Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Balai KSDA.

Tugas Pokok dan Fungsi

Balai KSDA Sumatera Barat mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial. Sedangkan tugas pokok fungsi UPT Balai KSDA Sumatera Barat antara lain :

1. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

2. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

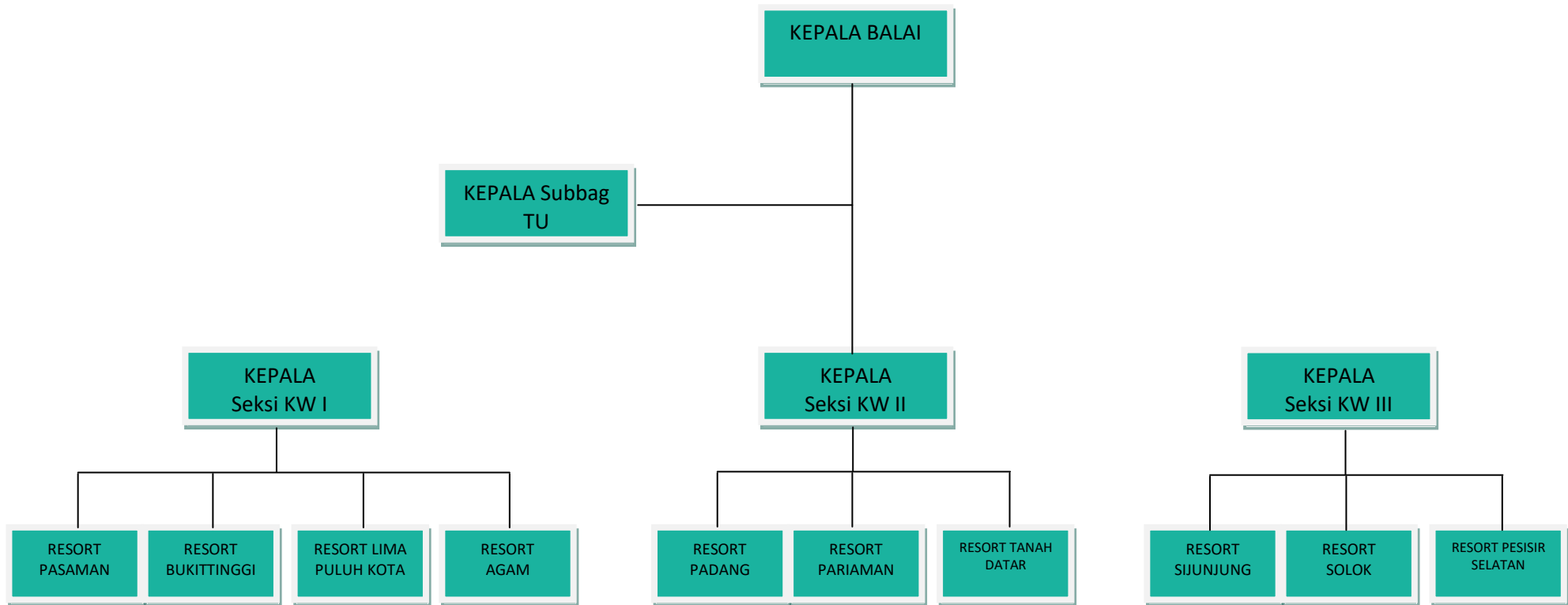
C. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur Organisasi

Balai KSDA Sumatera Barat dikategorikan Balai Tipe A dengan 4 jabatan eselon IV-a sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di Padang;
2. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I yang berkedudukan di Lubuk Sikaping dengan wilayah kerja: Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam;
3. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II yang berkedudukan di Batusangkar dengan wilayah kerja: Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Pariaman;
4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III yang berkedudukan di Muaro Sijunjung dengan wilayah kerja: Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Solok.

STRUKTUR BALAI KSDA SUMATERA BARAT



Gambar 1 Struktur Balai KSDA Sumatera Barat

Dukungan personil berjumlah 117 orang yang terdiri dari 5 orang struktural, 32 orang pegawai fungsional umum, 36 orang Polisi Kehutanan, 24 orang Pengendali Ekosistem Hutan, 2 orang Penyuluh Kehutanan, dan 1 orang Swadaya Masyarakat. Pada tahun 2020, Balai KSDA Sumatera Barat menerima 23 orang tenaga kontrak dan 5 orang tenaga Bakti Rimbawan yang ditempatkan di KPHK lingkup Sumatera Barat. Tingkat pendidikan pegawai Balai KSDA Sumatera Barat beraneka ragam, mulai dari SLTP sampai dengan S3.

BAB. II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungannya tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realiasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian yang tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang

sesungguhnya dari Balai KSDA Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2018. Terdapat 1 (satu) sasaran dan tiga indikator kinerja yang diemban oleh Balai KSDA Sumatera Barat yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai KSDA Sumatera Barat dengan Direktur Jenderal KSDAE. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja program Balai KSDA Sumatera Barat 2018 adalah pada tabel berikut.

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Program Balai KSDA Sumatera Barat KSDAE Tahun 2019

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen zonasi dan/ atau blok	Dokumen	4	4	100
		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	4	6	150
		Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	unit KK	9	9	100
		Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha	Ha	10	-	-
		Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 propinsi	10 resort	10	10	100
		Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar 50 M	juta	60,18	69,99	116,31
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	-	-
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	orang	300	5772	150
		Jumlah KEE yang memiliki lembaga dan difasilitasi pembentukannya	unit KEE	1	-	-
		Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 desa	Desa/ Kelompok	2	2	100
Nilai SAKIP Ditjen KSDAE minimal 78,00	Layanan	1	1	100		

Tabel 2 : Capaian Indikator Kinerja Program Balai KSDA Sumatera Barat KSDAE Tahun 2020 (s.d. September 2020)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	Layanan	1	1	
2	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Dokumen	1	1	
3	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	34		
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	1		
4	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	hektar	71.000		
5	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	Destinasi	1		
		Jumlah unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	Unit	1		
6	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	Hektar	294187		

Sumber : E Monev SMART DJA, September, 2020

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 DAN DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sampai akhir tahun anggaran 2019, Balai KSDA Sumatera Barat didukung alokasi anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal KSDAE dengan total anggaran sebesar Rp18.971.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah). Penyerapan

anggaran DIPA Tahun 2019 Balai KSDA Sumatera Barat secara keseluruhan sangat baik, sebesar Rp. 18.441.120.095,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu sembilan puluh lima rupiah), atau sekitar 97,20 % dari total pagu.

Pagu DIPA BA 29 Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2019 melalui 2 (dua) kali revisi DIPA atau update POK. Revisi DIPA/update POK terjadi dalam hal pagu tetap namun terjadi pergeseran anggaran dalam 1 output dalam 1 kegiatan yang sama. Revisi DIPA/update POK terjadi karena adanya perubahan akun, pengurangan dan penambahan anggaran. Berikut dipaparkan rincian revisi DIPA yang dilakukan oleh Balai KSDA Sumatera Barat :

1. Revisi DIPA Kesatu tertanggal 1 April 2019 dengan pagu anggaran tetap berupa pergeseran anggaran antar komponen pada satu output, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pergeseran anggaran pada output 5419.994 Layanan Perkantoran
 - Pergeseran anggaran pada subkomponen 002.B Pemeliharaan gedung, kantor, dan halaman sebesar Rp. 175.500.000,- dan 002.E Kebutuhan sehari-hari kantor sebesar Rp. 24.550.000,-
 - Penambahan anggaran pada subkomponen 002.A Langganan daya dan jasa Rp. 7.370.000,- 002.C Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor sebesar Rp. 54.180.000,- dan 002.D Perjalanan Pimpinan/Staf kegiatan koordinasi/konsultasi/rapat/bimtek/sosialisasi sebesar Rp. 138.500.000,-
 - b. Pergeseran anggaran pada output 5425.011 Perlindungan dan pengamanan berbasis resor bersama masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air berupa :
 - Pengurangan anggaran pada subkomponen 051.A Patroli KK dan Ground check open area sebesar Rp. 5.700.000,- dan 051.B Patroli Kawasan KPHK Arau Hilir dan Ground check open area sebesar Rp. 6.300.000,-
 - Penambahan subkomponen baru 051.F Honor bakti rimbawan sebesar Rp. 12.000.000,-

- c. Pergeseran anggaran pada output 5425.970 Layanan dukungan manajemen satker berupa :
 - Pengurangan anggaran pada komponen 052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebesar Rp. 31.500.000,- dan komponen 054 Pengelolaan kepegawaian sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Penambahan anggaran pada komponen 051 Penguatan kelembagaan sebesar Rp. 46.500.000,-
2. Revisi DIPA ke-2 tertanggal 22 Oktober 2019 dengan pagu anggaran tetap berupa pergeseran anggaran antar komponen pada satu output pada satu kegiatan yang sama :
 - a. Pergeseran anggaran pada output layanan perkantoran (5419.994) pada komponen gaji dan tunjangan (001) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengurangan anggaran pada akun B10000 (gaji pokok dan tunjangan) sebesar Rp. 1.178.068.000,-
 - Penambahan anggaran pada akun B11129 (uang makan) sebesar Rp. 57.000.000,-
 - Penambahan anggaran pada akun B12411 (tunjangan kinerja) sebesar Rp. 1.121.068.000,-
 - b. Pergeseran anggaran pada output Layanan perkantoran (5419.994) pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran (002);
 - c. Pergeseran anggaran pada output Perlindungan dan pengamanan berbasis resor bersama masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air (5425.011);
 - d. Pergeseran anggaran pada output Pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi (5425.027);
 - e. Pergeseran anggaran pada output Operasional penyelamatan TSL (WRU) berbasis masyarakat (5425.040)
 - f. Pergeseran anggaran pada output Layanan dukungan manajemen satker (5425.970).

Lebih lengkapnya, realisasi penyerapan anggaran akan disajikan secara lengkap dan detail pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 : Penyerapan Anggaran DIPA Balai KSDA Sumatera Barat TA 2019

Akun	Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi	%
5.419.994	Layanan Perkantoran	14.749.000.000	14.571.156.234	98,79
5.425.001	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis masyarakat	657.000.000	645.878.125	98,31
5.425.010	Penyiapan Prakondisi dan Pengelolaan Kolaboratif Hutan konservasi Bersama Masyarakat	130.000.000	74.645.000	57,42
5.425.011	Perlindungan dan Pengamanan Berbasis Resor Bersama Masyarakat	1.100.000.000	1.006.656.906	91,51
5.425.015	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan TSL	32.500.000	30.240.000	93,04
5.425.022	Persentase Peningkatan Populasi Species Terancam Puna	500.000.000	482.824.275	96,56
5.425.027	Pengembangan Ekowisata dan Wisata Bahari pada Kawasan Konservasi	35.000.000	34.600.000	98,86
5.425.034	Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Esensial yang Terbentuk dan Berfungsi	417.500.000	315.592.800	75,59
5.425.040	Operasional Penyelamatan TSL (WRU) Berbasis Masyarakat	500.000.000	494.785.200	98,96
5.425.041	Pengelolaan Kolaboratif Hutan Konservasi Bersama Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi (Bina Daerah Penyangga)	100.000.000	94.100.000	94,10
5.425.951	Layanan sarana dan Prasarana Internal	150.000.000	143.750.000	95,83
5.425.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	600.000.000	546.891.555	91,15

Sumber : LKj Balai KSDA Sumatera Barat, 2019

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tertinggi adalah untuk kegiatan Operasional Penyelamatan TSL (WRU) Berbasis Masyarakat(98,86%) dan realisasi terendah pada kegiatan Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Esensial yang Terbentuk dan Berfungsi (75,59%). Rendahnya realisasi pada kegiatan tersebut diakibatkan keterlambatan pelaksana memulai pelaksanaan kegiatan (sekitar awal TW III) sementara rangkaian kegiatan pada output ini cukup banyak sehingga pencapaian target menjadi tidak optimal. Lambatnya pelaksanaan oleh tim pelaksana dikarenakan menunggu juknis terkait dari pusat, mengingat selama ini

Balai KSDA hanya berfungsi sebagai fasilitator didalam pengelolaan KEE dan wewenang berada di tangan satker pemerintah daerah.

Untuk pagu anggaran Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2020 pada awalnya sebesar Rp.22.422.062.000,- namun akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, terbitlah Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, sehingga mengakibatkan pemotongan anggaran yang menyisakan Rp.18.422.062.000,-(*delapan belasmilyar empat ratus dua puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah*) dengan penyerapan (hingga tanggal 30 September 2020) sebesar Rp. 14.770.402.863,-(*empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*) atau 79,04 %.

Rincian pagu dan realisasi anggaran Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2020 (sampai dengan tanggal 30 September 2020) disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 4 : Realisasi Anggaran BKSDA Sumatera Barat Per Tanggal 30 September 2020.

Akun	Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi	%
5419.994	Layanan Perkantoran	14.764.000.000		
5420.003	Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	86.900.000		
5421.002	Jumlah Desa yang Mendapatkan Akses Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	782.440.000		
5421.003	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	411.460.000		
5422.001	Luas Kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	410.720.000		
5423.001	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan Sebagai Lokasi Kunjungan	661.202.000		
5423.002	Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	433.680.000		
5424.001	Luas Kawasan Sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional diluar Kawasan Konservasi	150.800.000		
5419.951	Layanan sarana dan Prasarana Internal	139.000.000		
5419.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	581.860.000		

Sumber : Laporan realisasi anggaran Balai KSDA Sumatera Barat bulan September, 2020

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional

Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar (*conservation for protecting wildlife*), namun kini konservasi juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi (*conservation for community welfare*), restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya. Sejak abad ke-20, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam World Conservation Strategi, yaitu:

- (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta
- (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumber daya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Didalam penyusunan RPJMN 2020-2024, terdapat 3 (tiga) target pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan hutan dan APL dengan nilai biodiversitas tinggi;
2. Mengelola, melindungi, dan memanfaatkan kawasan konservasi dan biodiversitas berbasis desa;
3. Menyiapkan 25 TN/TWA prioritas sebagai pendukung destinasi wisata prioritas nasional dan berkonsep SAVE (Science, Academic, Voluntary and Education)

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, melalui Sasaran Program:

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upayakonservasi keanekaragaman hayati.
2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Dari 7 (tujuh) prioritas nasional yang dicanangkan didalam RPJMN tahun 2020-2024, Balai KSDA Sumatera Barat selaku instansi vertikal dibawah Ditjen KSDAE hanya dibebankan 2 prioritas nasional sesuai dengan eselon I diatasnya, yaitu :

PRIORITAS NASIONAL 1
"Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas"

1. Peningkatan kuantitas/
ketersediaan air untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi
2. Peningkatan nilai tambah,
lapangan kerja, dan investasi di
sektor riil, dan industrialisasi

DUKUNGAN OUTPUT

1. Jumlah desa yang mendapatkan
akses pengelolaan KK dan
peningkatan usaha ekonomi
produktif
2. Jumlah destinasi wisata alam yang
disiapkan sebagai lokasi
kunjungan
3. Jumlah ijin pemanfaatan jasa

PRIORITAS NASIONAL 6
"Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim"

1. Meningkatnya ketahanan bencana
dan iklim
2. Mitigasi perubahan iklim melalui
implementasi pembangunan
rendah karbon

DUKUNGAN OUTPUT

1. Luas kawasan sebagai penyediaan
data informasi dan rencana
konservasi nasional didalam KK;
2. Dokumen Pemolaan KK;
3. Jumlah KK yang ditingkatkan
efektivitas pengelolaannya;
4. Luas kawasan yang diverifikasi
sebagai perlindungan
keanekaragaman spesies dan
genetik TSL;
5. Luas kawasan sebagai penyediaan
data, informasi, dan rencana
konservasi nasional diluar
kawasan konservasi.

Selanjutnya disusun Rencana Kerja Pemerintah atau dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Proyek Prioritas Nasional sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja. Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut.

Untuk tahun 2021 pagu alokasi Balai BKSDA Sumatera Barat sebesar Rp.24.477.201.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah), dengan rincian per kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5 : Rincian Pagu Anggaran Balai KSDA Sumatera Barat TA 2020

Kode	Uraian	Target	Pagu
5424.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 rekomendasi	75.000.000
5424.QMA	Data dan Informasi Publik	156.607 layanan	129.201.000
5420.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1 rekomendasi	215.000.000
5420.QMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan	516.000.000
5421.AED	Perjanjian	300 Perjanjian	1.700.000.000
5421.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	65 Lembaga	2.312.000.000
5421.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1017 rekomendasi kebijakan	2.804.000.000
5422.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	3 rekomendasi	475.000.000
5422.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2 lembaga	272.000.000
5423.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan	75.000.000
5423. RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	1 unit	400.000.000
5419. EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	14.764.000.000
5419. EAC	Layanan Umum	1 Layanan	600.000.000
5419. EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	40.000.000
5419. EAE	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	50.000.000
TOTAL			24.477.201.000

Pagu alokasi Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 dialokasikan oleh Ditjen KSDAE berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan). Sesuai dengan RKP 2021, pagu alokasi tahun 2021 sebesar **Rp.24.477.201.000**. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan

Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial;serta (6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan dalam beberapa output kegiatan antara lain :

1) Layanan Dukungan Manajemen Satker

Output ini bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan Balai KSDA Sumatera Barat dalam pencapaian nilai Sakip Kementerian LHK sebesar 78 point dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Sumatera Barat. Target capaian output tersebut sebanyak 1 (satu) layanan dengan kegiatan yang akan dilakukan antara lain

- a) Penyusunan RKA-KL Tahun 2021
- b) Penyusunan Rencana Kerja Lingkup Balai
- c) Pemantauan Kegiatan Untuk Pelaporan E-Monev Bappenas
- d) Penyusunan Buku Statistik BKSDA Sumbar Tahun 2018
- e) Penyusunan Laporan Capaian Renja BKSDA Sumbar T.A 2018
- f) Penyusunan Laporan Kinerja Balai KSDA Sumbar Tahun 2018
- g) Penyelenggaraan SPIP
- h) Penyusunan laporan keuangan
- i) Honor Bakti Rimbawan
- j) Penilaian Dupak di Tingkat UPT
- k) Pengelolaan data kepegawaian
- l) Penatausahaan BMN
- m) Penyusunan laporan BMN

2) Layanan Perkantoran

Output layanan perkantoran ditarget untuk pemenuhan belanja gaji pegawai Balai KSDA Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun serta pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Balai KSDA

Sumatera Barat. Target capaian output tersebut sebanyak 1 (satu) layanan dengan kegiatan yang akan di lakukan antara lain :

- a) Gaji dan tunjangan pegawai Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2021
- b) Operasional dan pemeliharaan kantor yang terdiri dari : langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung, kantor, dan halaman, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, perjalanan pimpinan, kebutuhan sehari-hari kantor.

3) Layanan Sarana Internal

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2021 diusulkan untuk pembiayaan kegiatan layanan sarana internal dengan target capaian output 1 (satu) unit sebagai berikut:

- a) PC/ Laptop
- b) AC

4) Layanan Prasarana Internal

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2021 diusulkan untuk pembiayaan kegiatan layanan prasarana internal dengan target capaian output 1 (satu) unit sebagai berikut:

- a) Pembuatan garasi kantor resor (RKW Padang Pariaman)

5) Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah ekosistem di luar kawasan hutan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Kawasan Ekosistem Esensial berperan penting dalam mendukung perlindungan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, dan keanekaragaman genetik), selain itu Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) mempunyai posisi penting yang memberikan kontribusi berupa barang dan jasa lingkungan serta menunjang tumbuhnya sektor sektor ekonomi.

Target capaian output berupa satu rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian output ini, antara lain :

- a) Review rencana aksi perlindungan KEE
- b) Monitoring KEE
- c) Penguatan SDM pengelolaan KEE
- d) Identifikasi pengembangan ekonomi produktif KEE

6) Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi diluar Kawasan Konservasi

Merupakan amanat pejabaran dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan pengalokasian dan pengelolaan kawasan konservasi dengan tujuan utama sebagai kawasan pelestarian sistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah dan praktek-praktek pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati. Kegiatan yang dilaksanakan pada output ini berkaitan dengan target Direktorat BPEE dengan target capaian output berupa 156.607 layanan, dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a) Survey potensi keanekaragaman hayati di SKW I, II, III

7) Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi

Output ini terkait dengan target direktorat PIKA dengan target capaian output berupa 1 (satu) rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a) Pemantauan Fungsi Kawasan Konservasi
- b) Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi

8) Kawasan Konservasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi

Output ini terkait dengan target direktorat PIKA dengan target capaian output berupa 1 (satu) layanan dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK di SKW I, II III

- b) Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan

9) Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi

Output ini terkait dengan target direktorat Kawasan Konservasi dengan target capaian output berupa 300 (tiga ratus) perjanjian dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Identifikasi Wilayah Kemitraan Konservasi
- b) Fasilitasi Pemberian Akses Kelola Kepada Masyarakat sekitar KK
- c) Pendampingan pembinaan/ Peningkatan/ Penguatan Kapasitas Kelompok
- d) Peningkatan Kapasitas SDM UPT

10) Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi

Output ini terkait dengan target direktorat Kawasan Konservasi dengan target capaian output berupa 65 (enam puluh lima) lembaga dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Pembangunan kelembagaan untuk 15 nagari
- b) Penguatan kelembagaan untuk 10 nagari
- c) Peningkatan kapasitas untuk 20 kelompok
- d) Pendampingan kelompok binaan untuk 20 kelompok
- e) Pembentukan kelompok masyarakat desa binaan sebanyak 15 nagari
- f) Penyusunan rencana pembinaan selama 5 tahun
- g) Penyusunan RKT
- h) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat di 15 nagari

11) Area Terbuka (Opened Area) di Kawasan Konservasi yang ditangani

Output ini terkait dengan target direktorat Kawasan Konservasi dengan target capaian output berupa 1006 (seribu enam) rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Kajian Pemulihan Ekosistem
- b) Sosialisasi Pemulihan Ekosistem
- c) Pengendalian Jenis Invasif 200 Ha
- d) Konsultasi ke Pusat dalam Rangka Pengesahan PE

e) Pengamanan PE Mekanisme Alam Seluas 810 Ha

12) Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya

Output ini terkait dengan target direktorat Kawasan Konservasi dengan target capaian output berupa 11 (sebelas) rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Identifikasi dan survey potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem darat (terrestrial)
- b) Identifikasi dan survey potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan

13) Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Species dan Genetik TSL

Output ini terkait dengan target direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan target capaian output berupa 3 (tiga) rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Inventarisasi Potensi Satwa Primata di TWA Saibi Sarabua
- b) Inventarisasi dan Monitoring TSL dengan Camera Trap di SKW I, II, III
- c) Sosialisasi TSL yang dilindungi di SKW I, II, III
- d) Inventarisasi Taxus Sumatrana di TWA Singgalang Tandikat Kabupaten Tanah Datar
- e) Inventarisasi dan Monitoring Sebaran Satwa Buaya di Resor Padang, Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, dan Pasaman
- f) Inventarisasi dan Monitoring Tumbuhan yang dilindungi diluar KK di Wilayah Kerja SKW I, II, III
- g) Penanganan Konflik Satwa

14) Entitas Perlindungan dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan

Output ini terkait dengan target direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan target capaian output berupa 1 (satu) lembaga dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Pembinaan Lembaga Konservasi
- b) Monitoring Lembaga Konservasi
- c) Penilaian dan Evaluasi Kelayakan Lembaga Konservasi
- d) Rapat Pembahasan Hasil Penilaian dan Evaluasi
- e) Konsultasi Kepala Seksi Konservasi Wilayah

15) Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL yang dikembangkan

Output ini terkait dengan target direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan target capaian output berupa 1 (satu) lembaga dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Pembinaan Pengedar TSL
- b) Monitoring Evaluasi Pengedar TSL
- c) Pembinaan Penangkar TSL
- d) Monitoring Evaluasi Penangkar TSL

16) Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam

Output ini terkait dengan target direktorat PJLHK dengan target capaian output berupa 1 (satu) layanan dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a) Penetapan Area Pemanfaatan Air 2 Lokasi

17) Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi

Output ini terkait dengan target direktorat PJLHK dengan target capaian output berupa 1 (satu) unit dan kegiatan yang dilakukan, antara lain :

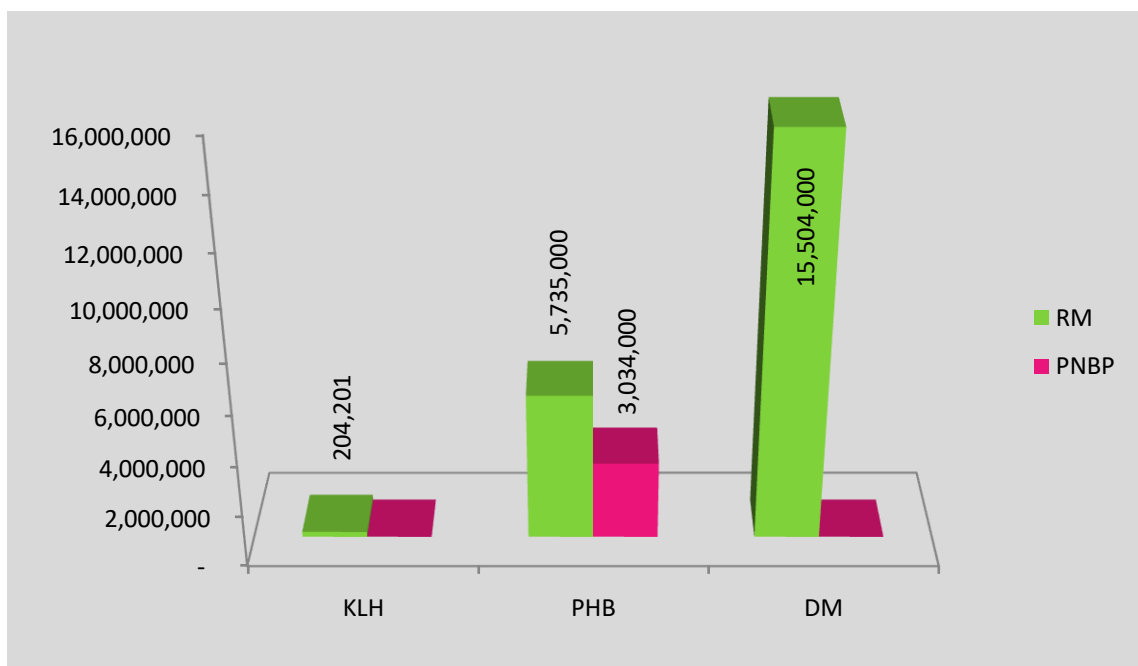
- a) Pembuatan dan Pemasangan Sarpras Wisata di TWA Lembah Harau dan TWA G. Marapi
- b) Pembangunan Sarpras Wisata TWA Gunung Marapi

Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran tahun 2021 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 6. Pagu Indikatif Tahun 2020BKSDA Sumbar per Jenis Belanja & Sumber Dana

No	Program	Jenis Belanja	Sumber Dana		Jumlah
			RM	PNBP	
1	Kualitas Lingkungan Hidup	Operasional	0	0	0
		Non Operasional	204.201	0	204.201
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Operasional	0	0	0
		Non Operasional	5.735.000	3.034.000	8.769.000
3	Dukungan MAnajemen	Operasional (Layanan Perkantoran)	14.764.000	0	14.764.000
		Non Operasional	740.000	0	740.000
TOTAL			21.443.201	3.034.000	24.477.201

Dibawah ini adalah grafik yang menggambarkan perbandingan pagu Balai KSDA Sumatera Barat tahun 2020 berdasarkan jenis belanja dan sumber anggaran :



Gambar 1 : Gambar 2 Diagram Pagu Indikatif Tahun 2018 BKSDA Sumbar per Jenis Belanja & Sumber Dana

Belanja Non Operasional senilai Rp. 9.713.201.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus satu ribu rupiah) atau sebesar 39,68% dari total pagu anggaran digunakan

untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2021 dan Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Rencana Kerja ini nantinya akan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2021 di wilayah kerja Balai KSDA Sumatera Barat.

Rencana Kerja Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2021 sebagai penjabaran tahun keduadari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai KSDA Sumatera Barat Tahun 2020-2024, dan menjadi acuan dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021. Dalam proses selanjutnya, yaitu penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Balai KSDA Sumatera Barat yang dilakukan di awal tahun anggaran 2021, dokumen Rencana Kerja juga akan berfungsi sebagai acuan.

Agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat kepada Balai KSDA Sumatera Barat dapat tercapai secara optimal, maka perlu diberikan perhatian yang serius terhadap hal-hal yang telah disusun didalam dokumen rencana kerja ini, dan senantiasa dijadikan pedoman/acuan dalam setiap tindakan/kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

LAMPIRAN

RENCANA KERJA BALAI KSDA SUMATERA BARAT TAHUN 2021

Lampiran 1

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA -K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021**

- 1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2. Program : 1. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
2. Kualitas Lingkungan Hidup
3. Dukungan Manajemen
- 3. Sasaran Program : 1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati
2. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL
4. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi
5. Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi
6. Meningkatnya Tata Kelola yang Baik di Lingkup Ditjen KSDAE
- 4. Kegiatan : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
2. Pembinaan Konservasi Ekosistem esensial
3. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
4. Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Konservasi Spesies dan Genetik
6. Pemanfaatan Jasa Lingkungan kawasan Konservasi
- 5. Unit Organisasi : Balai KSDA Sumatera Barat
- 6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Prioritas Nasional	Program prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Pagu Anggaran
I	Program Kualitas Lingkungan Hidup								
I.1	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 rekomendasi kebijakan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan	75.000.000,-

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Prioritas Nasional	Program prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Pagu Anggaran
					Bencana, dan Perubahan Iklim			Ekosistem	
		Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	156.607 ha	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	129.201.000,-
II	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
II.1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	8 unit KK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	215.000.000,-
		Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam Kawasan Konservasi (Hektar)	40000 Ha	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	516.000.000,-
II.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	15 desa	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	2.312.000.000,-
		Area Terbuka (Opened Area) di Kawasan Konservasi yang ditangani	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	4457 Hektar	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	2.533.000.000,-

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Prioritas Nasional	Program prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Pagu Anggaran
II.3	Konservasi Spesies dan Genetik	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengeloalaannya	Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengeloalaannya (Unit KK)	10 Unit KK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	1.025.000.000,-
		Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	865900 Hektar	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	1.051.000.000,-
		Entitas Perlindungan dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	4 lembaga	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	196.000.000,-
		Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL yang dikembangkan (Koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	3 entitas	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri berbasis kehutanan	76.000.000,-
		Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Jumlah Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Entitas)	1 Unit	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pengelolaan hutan berkelanjutan	Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	75.000.000,-
II.4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)	1 unit	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan 18 TN Prioritas dan TWA Prioritas untuk mendukung KSPN)	400.000.000,-

No.	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Prioritas Nasional	Program prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Pagu Anggaran
III	Program dukungan Manajemen								
III.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Layanan Perkantoran	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 minimal 78 poin	1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	14.764.000.000,-
		Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	650.000.000,-
		Layanan Sarana Internal		1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	40.000.000,-
		Layanan Prasarana Internal		1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	50.000.000,-

**MATRIK STRUKTUR PENCAPAIAN IKK
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**

No	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target		Komponen
I	Program Kualitas Lingkungan Hidup					
I.1	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 rekomendasi kebijakan	052	Efektivitas Pengelolaan KEE Koridor Hidupan Liar dan ABKT
		Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	156.607 ha	051	Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati
II	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan					
II.1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	8 unit KK	053	Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi
		Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam Kawasan Konservasi	40000 Ha	051	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK

No	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target		Komponen
			(Hektar)			
II.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	15 desa	051	Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di Sekitar KK
					052	Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Kumulatif)
					053	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa
					051	Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
					052	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi Bersama Masyarakat Desa
					051	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
					053	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
					054	Pengendalian Kebakaran Hutan
					051	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi
					051	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi
II.3	Konservasi Spesies dan Genetik	Kawasan Perlindungan	Luas kawasan yang diinventarisasi dan	865900 Hektar	051	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi

No	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen
		Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif		
				052	Intervensi Manajemen TSL diluar Kawasan Konservasi
				053	Penanganan Satwa Transit dan Konflik
		Entitas Perlindungan dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	4 lembaga	053 Penilaian dan Evaluasi Kelayakan Lembaga Konservasi
		Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL yang dikembangkan (Koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	3 entitas	051 Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran
II.4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Jumlah Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Entitas)	1 Unit	051 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/ Energi air
		Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)	1 unit	052 Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di Kawasan Konservasi
III	Program dukungan Manajemen				

No	Program/Kegiatan	Output	Indikator Output	Target	Komponen	
III.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Layanan Perkantoran	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 minimal 78 poin	1 Layanan	001	Gaji dan Tunjangan
					002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
					052	Pelaksanaan Evaluasi dan Kehumasan
					053	Pengelolaan Keuangan, Umum, dan Perlengkapan
		Layanan Sarana Internal		1 Layanan	997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
		Layanan Prasarana Internal		1 Layanan	998	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan